

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN
TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN
(STUDI EMPIRIS PADA KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2011-2015)**

***THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE, PERCAPITA INCOME,
EDUCATION LEVEL ON LEVEL POVERTY (EMPIRIC STUDY ON CITY IN WEST
JAVA PROVINCE DURING 2011-2015)***

Devito Frans¹, Sri Rahayu², Dewa Putra Khrisna Mahardika³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹devito_fm@yahoo.co.id, ²srirahayunchi@yahoo.co.id, ³emaildosen@yahoo.com.

Abstrak

Kemiskinan menjadi salah satu masalah fundamental dari suatu daerah yang didalamnya terdapat berbagai faktor yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Menurut *World Bank*^[17], kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi lainnya. Seperti rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil dari website resmi BPS yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran masing-masing kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011 sampai tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel sensus dan populasi yang digunakan adalah Kota di Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari sembilan kota dengan tahun penelitian 2011-2015. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews versi 8.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan, secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan variabel Tingkat Pendidikan yang proksikan dengan Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh dengan arah negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian secara simultan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada setiap Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada setiap Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Ini berarti bahwa dengan semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah dan PDRB Perkapita belum mampu menurunkan Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah secara parsial berpengaruh dengan arah negatif terhadap Tingkat Kemiskinan pada setiap Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Ini berarti bahwa semakin tinggi Rata-rata Lama Sekolah dapat berdampak pada berkurangnya Tingkat Kemiskinan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kemiskinan.

Abstract

Poverty is one of the fundamental problems of an area which there are various factors that always comes up in people's lives. According to the World Bank^[17], poverty was defined as a deficiency in prosperity, and consists of many other dimensions. Such as low levels of health, education, access to clean water and sanitation, inadequate physical security as well as the opportunity for a better life. The efforts to reduce the rate of poverty can not be done partially, it must include some aspects related to the basic needs of society.

This study aimed to determine the effect of the Local Government Revenue, Percapita Income, and Educational Level to Level Poverty at the City in the Province of West Java in 2011-2015. The data used in this study were taken from the official website of BPS which sourced from Budget Realization Report of each city in West Java Province in 2011-2015.

This study uses census sampling technique and the population used is the city in West Java province obtained from nine cities years of study from 2011 to 2015. The method of analysis in this study is panel data regression using Eviews software version 8.

Based on the test results showed, simultaneously Local Government Revenue, Percapita Income, and Educational Level has a significant influence on the Level Poverty. Partially, variable Regional Income and Percapita Income does not affect the Level Poverty. While the variable Educational Level as measured by average Mean Years of Schooling influential negative direction towards Level Poverty.

For the development of research, it is suggested that further researchers to add years of research, object of research, and use of another variables. While based on research results, it is expected the city government in the provinces of West Java be able to decrease the Level Poverty should be able to maximize high the Local Government Revenue, and high Income Percapita to be allocated as expenses that are able to reduce poverty.

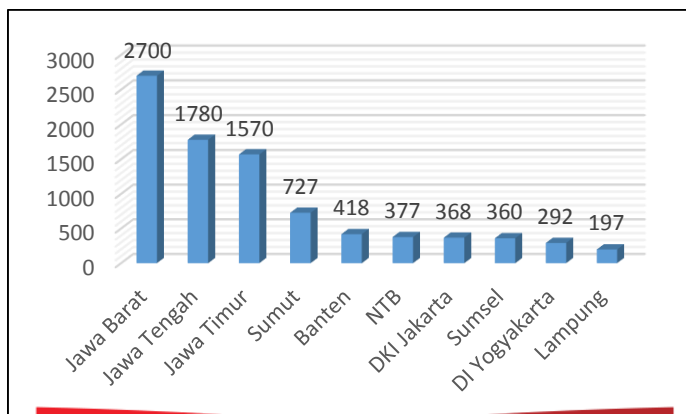
Based on the results of the analysis and discussion, the conclusion is concluded that the research results simultaneously show the Local Government Revenue, Percapita Income, and Educational Level together significantly influence the Level Poverty at the City in the Province of West Java in 2011-2015. Partially Local Government Revenue and Percapita Income do not have an effect on to Level Poverty at the City in the Province of West Java in 2011-2015. This means that with the high Local Government Revenue and PDRB Perkapita have not been able to reduce the Level Poverty. While the mean of the Old School partially influence with the negative direction of Level Poverty at the City in the Province of West Java in 2011-2015. This means that the higher the average school duration can have an impact on the reduced Level Poverty.

Keywords : *Local Government Revenue, Percapita Income, Educational Level, Level Poverty*

1. Pendahuluan

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah sebuah negara. Dalam sebuah Negara, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak - anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga (Prawoto)^[6]. Menurut *World Bank*^[17], kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi lainnya. Seperti rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 menyebutkan, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 35.377,36 km², didiami oleh penduduk sebanyak 46.709.600 jiwa sehingga menjadikan provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan *KOMPAS.com*^[14], menurut catatan BPS pada tahun 2015 dari 34 provinsi yang diamati dihasilkan data 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan perkotaan, pada urutan pertama provinsi Jawa Barat sekitar 2.700.000 jiwa, diurutkan kedua terdapat provinsi Jawa Tengah dengan 1.780.000 jiwa, lalu Jawa Timur sebanyak 1.570.000 jiwa, kemudian selanjutnya ada provinsi Sumut, Banten, NTB, DKI Jakarta, Sumsel, Yogyakarta, dan Lampung. Berikut disajikan dalam Grafik 1.1.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1.1

Perbandingan 10 Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak Berdasarkan Perkotaan Tahun 2015 (Dalam Ribuan)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Made Anom Iswara dan I Gusti Bagus Indrajaya^[4], menyebutkan Tingkat Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33^[9] tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 32^[8] tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya, menurut Santosa^[11] menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah. Semakin baik daerah dalam mengelola potensi daerahnya maka semakin tinggi pendapatan yang diterima sehingga daerah tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada. Menurut Arini dan Mustika^[2] menyatakan PAD yang diterima pemerintah daerah menggambarkan tingkat kesiapan daerah mengelola daerahnya. Sehingga dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.

Pendapatan Perkapita ialah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun) pendapatan perkapita dapat diperoleh dari pendapatan tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut (Sadono Sukirno)^[12]. Dalam penelitian ini Pendapatan Perkapita penduduk suatu daerah diprosikan dengan PDRB perkapita. Tony dan Arka^[16] menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB perkapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Sutrisna^[13] yang menyatakan Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB perkapita, dan mengatakan bahwa PDRB perkapita mempengaruhi kemiskinan. Wiguna^[15], mengindikasikan bahwa apabila PDRB perkapita meningkat maka penduduk di wilayah tersebut semakin sejahtera atau apabila PDRB perkapita meningkat, maka tingkat kemiskinan pun akan berkurang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20^[7] Pasal 1 ayat 1 tentang Pendidikan, pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Serupa dengan pendapatan perkapita tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Anderson^[1], Melalui pendidikan yang memadai, penduduk miskin akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari status miskin di masa depan, sedangkan Sadono Sukirno^[12] mengatakan bahwa individu yang memperoleh pendidikan yang tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Sutrisna^[13], menyatakan

bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka kemungkinan untuk menjadi golongan non-miskin meningkat, selain itu menurut Tony dan Arka^[16], Pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut data BPS provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan perkotaan, pada urutan pertama adalah provinsi Jawa Barat dengan jumlah sekitar 2.700.000 jiwa. Hal ini sangat bertolak belakang dengan terus meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan. Dimana seharusnya dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan secara terus menerus dapat menurunkan Tingkat Kemiskinan yang ada.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Tingkat Kemiskinan

Menurut *World Bank*^[17], Kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya sarana dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah

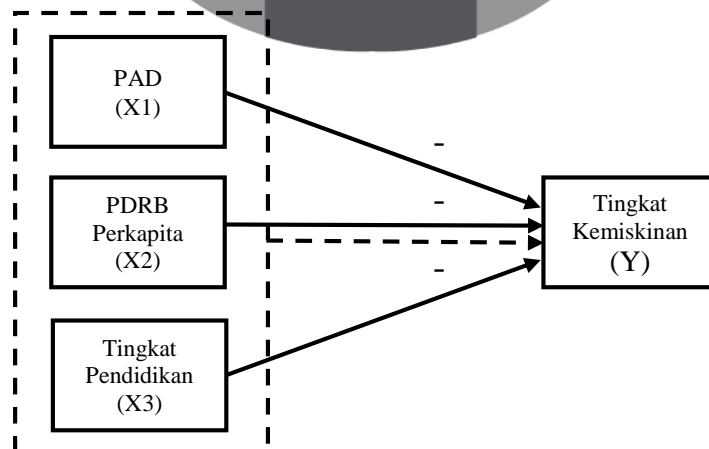
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33^[9] tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Perkapita

Pada penelitian ini Pendapatan Perkapita diprosikan dengan PDRB Perkapita, hal ini dikarenakan pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) yang menjadi komponen penghitungan pendapatan regional belum dapat dihitung. Menurut Badan Pusat Statistik^[3], Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita ialah jumlah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

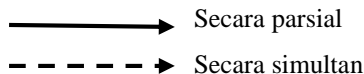
Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20^[7] tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:



Metodologi

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Kota-kota di provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Sembilan kota dengan periode penelitian tahun 2011-2015. Teknik sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (sensus). Menurut Riduwan^[10], Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan sensus.

Sehingga diperoleh 45 data observasi yang terdiri dari 9 kota dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan model *Random effect*.

Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KMKN = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \epsilon_1$$

Dimana :

- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope atau koefisien regresi atau intersep
- ϵ_1 = Varians Kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh PAD, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pendidikan

3. Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif berikut adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	KMKN (Persen)	PAD (Jutaan Rupiah)	PDRB (Jutaan Rupiah)	RLS (Tahun)
Maximum	19,98	1.859.694,65	78,91	10,78
Minimum	2,32	45.952,39	12,69	7,51
Mean	7,91	466.638,72	29,62	9,56
Std. Dev.	4,22	464.936,91	15,34	1,04
Observations	45	45	45	45

Sumber: Data diolah

Hasil uji deskriptif penelitian ini yang ditunjukkan dalam Tabel 1 menjelaskan secara deskriptif setiap variabel yang digunakan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan, PAD, PDRB Perkapita dan Tingkat Pendidikan memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Artinya, bahwa data variabel Tingkat Kemiskinan, PAD, PDRB Perkapita dan Tingkat Pendidikan tahun 2011-2015 bersifat tidak bervariasi atau mengelompok.

Pada variabel dependen yang pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah, jika dilihat secara keseluruhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada 9 kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 sebesar 466.638,72 juta rupiah, dengan nilai standar deviasi sebesar 464.936,91 juta rupiah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1.859.694,65 juta rupiah dan nilai minimum sebesar 45.952,39 juta rupiah. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2015 tidak bervariasi atau mengelompok. Dari keseluruhan 45 data kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015, terdapat 29 kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah dibawah rata-rata, sedangkan 16 kota lainnya memiliki rata-rata Pendapatan Asli

Daerah diatas rata-rata. Kota dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh kota Bandung tahun 2015 sebesar 1.859.694,65 juta rupiah, dan untuk kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu kota Banjar tahun 2011 sebesar 45.952,39 juta rupiah.

Berikutnya untuk Pendapatan Perkapita yang diprosikan dengan PDRB Perkapita, jika dilihat secara keseluruhan rata-rata PDRB Perkapita pada 9 kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 sebesar 29,62 juta rupiah dengan nilai standar deviasi sebesar 15,34 juta rupiah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 78,91 juta rupiah dan nilai minimum sebesar 12,69 juta rupiah. Nilai rata-rata PDRB Perkapita lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data PDRB Perkapita tahun 2011-2015 tidak bervariasi atau mengelompok. Dari keseluruhan 45 data kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015, terdapat 31 kota yang memiliki PDRB Perkapita dibawah rata-rata, sedangkan 14 kota lainnya memiliki rata-rata PDRB Perkapita diatas rata-rata. Kemudian kota dengan PDRB Perkapita tertinggi diperoleh kota Bandung tahun 2015 sebesar 78,91 juta rupiah, dan untuk kota yang memiliki PDRB Perkapita terendah yaitu kota Banjar tahun 2011 sebesar 12,69 juta rupiah.

Berikutnya untuk variabel dependen yang ketiga, dapat dilihat secara keseluruhan Rata-rata Lama Sekolah pada setiap kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 sebesar 9,56 tahun dengan nilai standar deviasi sebesar 1,04 tahun. Sedangkan nilai maksimum sebesar 10,78 tahun dan nilai minimum sebesar 7,51 tahun. Nilai rata-rata PAD lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2015 tidak bervariasi atau mengelompok. Dari keseluruhan 45 data kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015, terdapat 20 kota yang memiliki Rata-rata Lama Sekolah dibawah rata-rata, sedangkan 25 kota lainnya memiliki Rata-rata Lama Sekolah diatas rata-rata. Kemudian kota dengan Rata-rata Lama Sekolah tertinggi diperoleh kota Cimahi tahun 2015 sebesar 10,78 tahun, dan untuk kota yang memiliki Rata-rata Lama Sekolah terendah yaitu kota Banjar tahun 2011 sebesar 7,51 tahun.

Sedangkan untuk variabel independen, Tingkat Kemiskinan jika dilihat secara keseluruhan rata-rata Tingkat Kemiskinan pada setiap kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 sebesar 7,91% dengan nilai standar deviasi sebesar 4,22%. Sedangkan nilai maksimum sebesar 19,98% dan nilai minimum sebesar 2,32%. Nilai rata-rata Tingkat Kemiskinan lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data Tingkat Kemiskinan tahun 2011-2015 tidak bervariasi atau mengelompok. Dari keseluruhan 45 data kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015, terdapat 27 kota yang memiliki Tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata, sedangkan 18 kota lainnya memiliki rata-rata Tingkat Kemiskinan diatas rata-rata. Kemudian kota dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi diperoleh kota Tasikmalaya tahun 2011 sebesar 19,98%, dan untuk kota yang memiliki Tingkat Kemiskinan terendah yaitu kota Depok tahun 2013 sebesar 2,32%.

Tabel 2. Sampel Data yang Diatas dan Dibawah Rata-rata

	KMKKN diatas		KMKKN dibawah		Total
	Data	%	Data	%	
PAD diatas	0	0	16	35,55	16
PAD dibawah	21	46,67	8	17,78	29
Total	21	46,67	24	53,33	45
PDRB diatas	5	11,11	9	20	14
PDRB dibawah	13	28,89	18	40	31
Total	18	40	27	60	45
RLS diatas	4	8,89	22	48,89	26
RLS dibawah	14	31,11	5	11,11	19
Total	18	40	27	60	45

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas, pada variabel yang pertama Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bahwa terdapat 0 data yang menunjukkan nilai Pendapatan Asli Daerah diatas rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada diatas

rata-rata. Sedangkan terdapat 16 data yang menunjukkan nilai Pendapatan Asli Daerah diatas rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata. Kemudian terdapat 21 data yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dibawah rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada diatas rata-rata. Dan sisanya terdapat 8 data yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dibawah rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada dibawah rata-rata.

Pada variabel kedua Pendapatan Perkapita yang diprosikan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita terdapat 5 sampel data yang menunjukkan nilai PDRB Perkapita diatas rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada diatas rata-rata. Sedangkan terdapat 9 sampel data yang menunjukkan nilai PDRB Perkapita diatas rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata. Kemudian terdapat 21 data yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dibawah rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada diatas rata-rata. Dan sisanya terdapat 8 data yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dibawah rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada dibawah rata-rata.

Untuk variabel ketiga Tingkat Pendidikan yang di proksikan dengan Rata-rata Lama Sekolah terdapat 4 sampel data yang menunjukkan nilai Tingkat Pendidikan diatas rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada diatas rata-rata. Sedangkan terdapat 22 sampel data yang menunjukkan nilai Tingkat Pendidikan diatas rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata. Kemudian terdapat 14 data yang menunjukkan Tingkat Pendidikan dibawah rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada diatas rata-rata. Dan sisanya terdapat 5 data yang menunjukkan Tingkat Pendidikan dibawah rata-rata, maka nilai Tingkat Kemiskinan berada dibawah rata-rata.

Berdasarkan Hasil Uji Chow, menunjukkan *probability (p-value) cross section F* sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan model *fixed effect* lebih tepat. Setelah Uji Chow selesai dilaksanakan, maka selanjutnya dilakukan Uji Hausman, dan diperoleh nilai *probability (p-value) cross section F* sebesar 0.7073 lebih besar dari taraf signifikansi 5%, maka dapat diputuskan bahwa H_1 ditolak dan model *random effect* lebih tepat dibandingkan model *fixed effect*. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji signifikansi *Random Effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	6.38E-07	8.41E-07	0.758229	0.4527
PDRB	-0.037663	0.035745	-1.053654	0.2982
RLS	-1.636460	0.624923	-2.618657	0.0123
C	24.37511	5.737017	4.248743	0.0001

Weighted Statistics			
R-squared	0.299533	Mean dependent var	0.549716
Adjusted R-squared	0.248279	S.D. dependent var	0.736221
S.E. of regression	0.638317	Sum squared resid	16.70541
F-statistic	5.844118	Durbin-Watson stat	0.925048
Prob(F-statistic)	0.002027		

Sumber: Hasil olahan data *Eviews* versi 8

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 3, Analisis Koefisien Determinasi (R^2) menggambarkan seberapa jauh kemampuan suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang ada dalam penelitian. Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Squared* model penelitian menunjukkan hasil sebesar 0.248279 atau 24,83%. Dengan demikian, maka variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pendidikan yang diprosikan dengan Rata-rata Lama Sekolah dapat menjelaskan atau dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan pada setiap Kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 sebesar 0.248214 atau 24.83% sedangkan sisanya sebesar 74,17% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang digunakan dalam model memiliki pengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian simultan pada penelitian ini digunakan untuk menguji variabel Pendapatan Asli Daerah, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pendidikan yang diprosikan dengan Rata-rata Lama Sekolah sebagai variabel bebas terhadap Tingkat Kemiskinan sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 3, menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.002027 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada setiap Kota di provinsi Jawa Barat.

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh dari setiap variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian parsial pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pendidikan yang diprosikan dengan Rata-rata Lama Sekolah sebagai variabel bebas terhadap Tingkat Kemiskinan sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 3 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai *probability* (T-statistic) Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.4527. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.4527 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, hal tersebut berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
2. Nilai *probability* (T-statistic) PDRB Perkapita sebesar 0.2982. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.2982 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, hal tersebut berarti PDRB Perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
3. Nilai *probability* (T-statistic) Tingkat Pendidikan yang diprosikan dengan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0.0123. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.0123 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, hal tersebut berarti Tingkat Pendidikan yang diprosikan dengan Rata-rata Lama Sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *probability* (T-statistic) sebesar 0.4527 yang berarti berada di atas taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $6.38E-07$. Hal tersebut berarti bahwa H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, sehingga Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu kota, belum tentu dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan pada kota tersebut.

Hasil pengujian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemiskinan. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dan dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatannya seperti belanja daerah, pembangunan daerah dan melengkapi sarana prasarana daerah guna memenuhi pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Panjaitan (2016), serta Made dan I Gusti (2014), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah.

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan Pendapatan Perkapita memiliki nilai *probability* (T-statistic) sebesar 0.2982 yang berarti berada di atas taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.037663 . Hal tersebut berarti bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, sehingga Pendapatan Perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Perkapita yang diperoleh suatu kota, belum tentu dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan pada kota tersebut.

Hasil pengujian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Perkapita dengan Tingkat Kemiskinan. Hal ini terjadi karena Pendapatan Perkapita suatu daerah biasanya tidak diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan, melainkan digunakan untuk perbaikan infrastruktur dari daerah yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Made dan I Gusti (2014), serta Susanti (2013), yang menyatakan bahwa PDRB Perkapita tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tony dan Arka (2015), menyatakan PDRB berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.8 menunjukkan Tingkat Pendidikan memiliki nilai *probability* (T-statistic) sebesar 0.0123 yang berarti berada di bawah taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan nilai koefisien regresi positif sebesar -1.636460. Hal tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Tingkat Pendidikan yang diperoleh suatu kota, akan berdampak terhadap berkurangnya Tingkat Kemiskinan pada kota tersebut.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Made dan I Gusti (2014) serta Indra dan Rachmad (2012), yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan Tingkat Pendidikan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan tingkat wawasan maupun pengetahuan seseorang dalam penerapan yang diperoleh untuk meningkatkan usahanya dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan faktor penentu untuk memperoleh hasil yang optimal dan pendapatan yang lebih menguntungkan. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahsunah (2013), menunjukkan dimana Pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi data panel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
- b. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
- c. Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
- d. Tingkat Pendidikan berpengaruh dengan arah negatif terhadap Tingkat Kemiskinan.

Daftar Pustaka :

- [1] Anderson, Courtney Lauren. (2012). *Opening Doors: Preventing Youth Homelessness Through Housing and Education Collaboration*. 11(2). Seattle Journal for Social Justice.
- [2] Arini dan Mustika, Made Dwi Setyadhi. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013*. 4 (9). ISSN: 2303-0178. 1140-1163. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Univeritas Udayana.
- [3] Badan Pusat Statistik (2016). www.bps.go.id
- [4] Iswara, I Made Anom dan Indrajaya, I Gusti Bagus. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Per Kapita, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2006 - 2011*. 3(11). ISSN: 2303-0178. 429-501. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Univeritas Udayana.
- [5] Iswara, I Made Anom dan Indrajaya, I Gusti Bagus. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Per Kapita, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2006 - 2011*. 3(11). ISSN: 2303-0178. 429-501. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Univeritas Udayana.
- [6] Prawoto, Nano. 2009. Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 9. Nomor 1, April 2009: 56 - 68.
- [7] Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- [8] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- [9] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- [10] Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel- Variabel Penelitian*. Cetakan Keempat, Bandung: Alfabeta
- [11] Santosa, Budi. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*. 5(2). *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- [12] Sukirno, Sadono. (2004) *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Norton, Seth. (2002). *Economic Growth And Poverty: In Search of Trickle-Down*, 22(2), 263-275. *Cato Journal*.

- [13] Sudiharta, Putu Seruni Pratiwi dan Sutrisna, Ketut. (2014). *Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*. 3(10). ISSN: 2303-0178. 431-439. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.
- [14] Suryowati, Estu. (2016, 4 Januari). Jawa Barat Tempati Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak. Kompas [online]. Tersedia : www.kompas.com [24 September 2016].
- [15] Wiguna, Van Indra. (2013). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- [16] Wirawan, I Made Tony dan Arka, Sudarsana. (2015). *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita, dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*. 4(5). ISSN: 2303-0178. 546-560. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Univeritas Udayana.
- [17] World Bank. 2010. World Development Report 2010 (Overview): Building Institutions for Markets. <http://dx.doi.org/10.1596/0-8213-5016-1>

